OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN DUNIA PENDIDIKAN

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TGL. : 4 - 8 - 2000
SUMBER/HARGA : H
KOLEKSI : K
NO. INVENTARIS : 4334/H/2000 (2)
KLASIFIKASI : 379.123 AMA

Oleh : DR. SYAMSUL AMAR, MS

PENATARAN DOSEN BIDANG ILMU PENDIDIKAN
SE KOPERTIS WILAYAH X
DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 13 DAN 15 MARET 2000

PROYEK KOPERTIS WILAYAH X
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN DUNIA PENDIDIKAN*

Dr. Syamsul Amar, M.S**

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bahagian integral dari pembangunan naisonal. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan nasional harus diawali dengan keberhasilan pembangunan daerah. Menurut sudut pandang *Public Choice Theory,* keberhasilan pembangunan nasional dan daerah sangat ditentukan oleh ketepatan kebijakan publik dalam pengembangan sektor produksi pada suatu negara. Kebijakan publik dianggap relatif tepat jika *path of economic development* berada dalam kerangka sistem yang didukung oleh potensi sumberdaya alam dan manusia yang dimiliki.. Penyimpangan yang semakin jauh dari jalur tersebut, mengindikasikan ketidaktepatan format kebijakan publik dan pada gilirannya mengakibatkan fondasi ekonomi relatif rapuh terhadap goncangan internal maupun eskternal.

---

* Disampaikan pada Penataran Dosen Bidang Studi Ilmu Pendidikan Dosen Kopertis Wilayah X Tangal 13 - 14 Maret 2000.

** Staf Pengajar Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Malapetaka yang dialami Indonesia dewasa ini akar permasalahannya terletak pada ketidaktepatan format kebijakan publik. Para pengambil keputusan sangat yakin dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dalam menciptakan kesejahteraan publik,namun tanpa mengkaji sampai sejauh mana asumsi paradigma tersebut dapat dipenuhi. World Development Report (1996) melaporkan bahwa mengadopsi growth model tanpa dapat memenuhi asumsi, mengakibatkan terjadinya lima ekses yaitu; (1) *jobless growth* (pertumbuhan tinggi - pengangguran tinggi), (2) *ruthless growth* (pertumbuhan tinggi - social welfare rendah, (3) *voiceless growth* (pertumbuhan tinggi - partispasi rendah), (4) *roothless growth* (pertumbuhan tinggi - budaya rendah) , (5) *futureless growth* (pertumbuhan tinggi - lingkungan rusak).

Kelima ekses tersebut selama PJPT I sampai paruh pertama PJPT II telah mewarnai perkonomian nasional dan daerah. Disisi lain berdasarkan aspek pemerataan *(size,functional distribution* and *regional disparity).* mengindikasikan telah terjadinya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Demikian juga halnya dengan masalah kemiskinan dan eskploitasi sumberdaya alam tanpa kerkendali telah menimbulkan gejolak

sosial, ekonomi dan politik. yang akhirnya menciptakan krisis ekonomi dan dikotomi antara pusat antara pusat dan daerah. Meskipun dikotonomi tersebut akhirnya terjawab oleh konsep otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konsideran UU No. 22 Tahun 1999 pada huruf c dinyatakan bahwa: dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggang jawab kepada daerah secara Proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan manfaat sumberdaya nasional ,serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. MENUJU PEMERINTAH YANG BERJIWA WIRAUSAHA

David Osborne & Ted Gaebler (1992) dalam bukunya "Reinveting Government" berpendapat bahwa dalam perkembangan dunia dewasa ini dituntut pemerintah yang berjiwa wirausaha *(entrepreneurial government)*. Pada dasarnya pemerintah yang berjiwa wirausaha tersebut adalah pemeritah yang mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang *entrepreneur* dan sekaligus dapat memanfaatkan ketiga komponen sumberdaya, yakni pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan perkembangan dunia yang mengarah ke era globalisasi yang penuh dengan persaingan, maka pemerintah (birokrasi) atau organisasi sektor publik yang didambakan oleh masyarakat adalah organisasi pemerintah yang inovatif, fleksible dan adaptif.

Dengan mengacu pendapat Osborne & Gaebler, secara garis besar prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahan yang berjiwa wirausaha tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas pemerintah diupayakan "diperluas", sehingga tidak hanya difokuskan hanya dalam penyedian pelayanan sosial saja, tetapi lebih

luas: memimpin, mengarahkan dan membuat kebijaksanaan hukum bagi kepentingan masyarakat.

2. Pemerintah hendaknya menciptakan iklim "persaingan". Persaingan disini bukan dimaksudkan bersaing dengan sektor swasta, tetapi persaingan melawan monopoli (competitifve government). Hal ini dimaksudkan agar terjadi kondisi yang saling mengisi antara pihak swasta dengan pihak pemerintah, sehingga jika misalnya pihak swasta telah melaksanakan suatu proyek pelayanan sosial, pihak pemerintah dapat mengalihkan ke sektor lainnya sehingga sekaligus dapat melakukan efisiensi tenaga,waktu dan dana.

3. Pemerintah hendaknya digerakkan oleh misi *(mission-driven government)*. hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan kegiatannya pemerintah (biokrasi) tidak terkesan sebagai lembaga otoritatif yang angkuh, tetapi sebagai suatu lembaga yang dapat secara cepat menjawab kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki dan pada akhirnya akan secara aktif terlibat dalam pembangunan (*Goverment owned Community)*.

4. Pemerintah menerapkan orientasi output *(result oriented government)*. Dalam hal ini pemerintah hendaknya lebih memusatkan kepada yang akan dihasilkan (output), dan bukannya memaksimalkan masukan (input), yang umumnya lebih berorientasi pada kenaikan anggaran pembangunan setiap tahunnya.
5. Pemerintah hendaknya bertindak seperti sektor swasta (perusahaan), terutama dalam pengelolaan dana (enterprising government). Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dirinya, terutama dalam penggalian sumber-sumber dana pembangunan semaksimal mungkin, sehingga tidak tergantung oleh sumber-sumber dana konvensional saja seperti pendapatan dari sektor pajak.

C. PELAYANAN MASYARAKAT DAN BIROKRASI

Kegiatan pelayanan yang selama ini dilakukan oleh sektor pemerintah merupakan jasa pelayanan publik yang sifatnya berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. Pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta lebih didasari oleh motif mencari keuntungan *(profit motive)*, sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh sektor publik lebih didasari oleh

pelaksanaan tugas pembangunan dan tidak mencari untung. Meskipun terdapat perbedaan yang mendasar antara pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, konsep strategi untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh sektor swasta adalah suatu yang layak untuk diterapkan pada lembaga sektor publik, tentunya melalui berbagai penyesuaian.

Salah satu konsep untuk mengoptimalkan pelayanan, dengan orientasi pada kepuasan pelanggan adalah konsep strategi yang dikembangkan oleh De Vrye (1994) yang dikenal dengan "*The Seven Secret of Service Success*". Ketujuh rahasia sukes tersebut adalah sebagai berikut :

1. Self Esteem (Harga Diri)

   Aparatur pemerintah dituntut bekerja dengan disertai perasaan bangga atas tugas yang diembannya, dan percaya bahwa output yang dihasilkan akan lebih baik. Sebagai contoh, kantor-kantor pemerintah daerah (Pemda) di haruskan memiliki kontak langsung dengan masyarakat, misalnya dalam hal pemberian izin usaha suatu perusahaan, diperlukan petugas yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan bangga terhadap tugasnya. Hal ini menjadi faktor

penting karena adanya perbedaan kepentingaan antara petugas yang melayani *(service provider)* dan yang dilayani (masyarakat), sehingga kolusi dapat dihindari.

2. Exceed Expectation (Memenuhi Harapan Secara Lebih)

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, hal penting yang harus diperhatikan oleh aparatur pemerintah adalah pemenuhan harapan dari masyarakat pelanggan. Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu standar mutu pelayanan yang tinggi dan pemahaman tentang keinginan masyarakat. Apabila kedua hal tersebut dapat dipenuhi maka keingingan masyarakat misalnya dalam hal kecepatan dan kemudahan pelayanan, dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparatur daerah.

3. Recover (Pembenahan)

Untuk memberikan mutu pelayanan yang tinggi dan baik kepada masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan. Setiap pengaduan dari masyarakat harus diperhatikan dan ditanggapi dengan cepat dan tepat. Dengan tidak ditanggapi pengaduan masyarakat tersebut secara

profesional akan menimbulkan dampak yang buruk dan bahkan dapat menjadi efek negatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembenahan-pembenahan dalam segala aspek pelayanan, termasuk sistem pelayanan, target waktu, sumberdaya manusia harus segera dilakukan dalam batas-batas kemampuan aparatur daerah.

4. Vision (Visi)

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka dibutuhkan kesamaan visi dari seluruh aparatur pemerintah yang terkait. Misi dan Visi pelayanan harus ditanamkan pada seluruh aparatur pemerintah sehingga dalam pelaksanan di lapangan tidak menimbulkan disintegrasi antar sesama aparatur daerah.

5. Improve (Perbaikan)

Indikator keberhasilan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu (a) kualitas teknik yang merupakan gambaran dari proses operasi, dan (b) kualitas fungsional yang berkaitan dengan interaksi antara customer dan service provider (petugas pemberi pelayanan).

6. Care (Perhatian)

Customer oriented telah menjadi dasar dari tindakan aparatur pemerintah, maka dalam kegiatan operasionalnya perlu diciptakan "*Customer Friendly System*" atau sistem yang menyenangkan pelanggan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah dituntut untuk bersikap ramah kepada masyarakat pelanggan. Kondisi ini pada gilirannya akan menciptakan hubungan yang makin baik antara kedua belah pihak.

7. Empowering (Pemberdayaan)

Pemberdayaan aparatur daerah pada segala tingkatan sangat diperlukan. Hal ini penting mengingat dengan aparatur daerah yang profesional selain dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pelanggan juga dapat memajukan dan mengembangkan organisasi ke arah yang lebih baik.

D. PENDIDIKAN YANG BERORIENTASI KEWIRAUSAHAAN

Otonomi memiliki implikasi terhadap kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian tersebut dapat diwujudkan dalam aspek pemerintahan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan sumberdaya dan pengambilan keputusan. Di sisi lain harus peka menanggapi perubaan yang terjadi dan mengakomodasikannya ke dalam kurikulum, termasuk perubahan yang terjadi pada dunia pemerintah, karena sektor pemerintah merupakan salahsatu pasar bagi produk sektor pendidikan.

Pemerintah daerah yang beroroientasi kewirausahaan adalah salah satu ciri utama pemerintahan otonom. Pemerintah daerah harus berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah karena, jika tidak demikian akan terjadi defisit APBD karena ketidakmampuan pemerintah menggali potensi yang dimilikinya. Dengan bergesernya pola pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi seyogianya direspon oleh kurikulum pendidikan karena pendidikan merupakan input dalam proses pembangunan. Dengan memperhatikan fenomena tersebut pergeseran kurikum pendidikan

haruslah berorientasi kepada pembentukan jiwa kewirausahaan agar output suatu pendidikan singkron dengan tuntutan pemerintah masa depan *(entrepreneurship government).*

Bangsa Indonesia telah lama dikenal sebagai bangsa yang berkewirausaha tinggi. Oleh karena itu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari, sebagai bagsa niaga yang telah melakukan perdagangan secara global sampai ke negeri Champa, dan pulau Madagaskar. Namun predikat tersebut makin lama makin luntur karena penjajahan yang bercokol selama 350 tahun telah membodohkan bangsa kita, menjadikan bangsa ini bersemangat lembek dan mempunyai jiwa inferior. Penjajahan telah menciptakan kelas priyayi dan menomor duakan kelas pedagang serta kelas swasta.

Keadaan demikian berlangsung lama, karena diperparah lagi oleh sikap sebagian besar orang menghargai priyayi dari pada pedagang dan usahawan. Oleh karena itu banyak lulusan sekolah termasuk lulusan perguruan tinggi yang tujuan hidupnya untuk menjadi pegawai negeri. Terjadinya hal tersebut karena sistem pedidikan selama ini, lebih menitik beratkan kepada penyediaan tenaga pegawai pemerintah maupun pegawai di

satu perusahaan dari pada mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa sebagai cikal bakal kewirausahaan . Banyak yang menyebutkan bahwa *"Economic Schools to day have been developed to be higher learning instituons doesnot to some extent for individuals to manage other people's business"*

Pendidikan di Fakultas Ekonomi masih banyak yang memberikan kuliah dalam kerangka Manajemen Umum (General Management) yang didasarkan atas dasar, management terpisah dengan kepemilikan. Akibatnya hasil didiknya banyak yang profesional dalam memimpin perusahaan tetapi tidak banyak yang menjadi pebisnis. Tendensi sebagian besar lulusan bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah ada, dan kalau dapat adalah perusahaan besar, tetapi usaha-usaha besar ternyata bukan tempat yang subur untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas..

Dewasa ini banyak kritikan kepada lembaga pendidikan terutama kepada Sekolah Ekonomi yang masih mengajarkan teori ekonomi klasik yang kadang-kadang kurang relevan dengan perkembangan ekonomi sekarang. Atas dasar itu maka timbullah koreksi pendidikan ekonomi kearah penyatuan konsep manajemen dengan *ownership, sources of employment, creating new*

job. Dari konsep tersebut didirikannya banyak *small business* atau *independent business.* Universitas yang tanggap terhadap masalah tersebut adalah Kobe University dengan memberikan kurikulum *"entrepreneurship"*. selanjutnya ditiru oleh beberapa Universitas di Amerika dan Kanada dengan mata kuliah *"Small Business Management"* atau *Enterpreneurship.*

Perubahan paradigma pendidikan telah terjadi di Jepang, Amerika dan Canada sudah dirintis sejak tahun 70-an, tetapi di Indonesia perubahan tersebut belum begitu tampak karena baru hanya beberapa universitas saja yang telah memasukan mata pelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikannya. Pada hal perguruan tinggi dituntut harus dapat merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ahli politik ekonomi menyebutkan bahwa untuk menjawab ketidak berhasilan faham komunis sebagai koreksi kapitalisme maka *"Entrepreneurship"* menjadi suatu jawaban karena kewirausahaan akan menciptakan pengusaha yang dapat menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Oleh karena itulah sudah saatnya pendidikan tinggi Indonesia harus menjadikan pendidikan kewirausahaan sebagai bahagian dari kulumnya.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

a. Kewirausahaan adalah alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pendapatan (wealth creation process)

b. Kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata (distinct) yang ada teori, konsep dan methode ilmiahnya.

Ada yang berpendapat bahwa ilmu kewirausahaan tumpang tindih dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain, malahan ada yang berpendapat bahwa kewirausahaan tidak dapat diajarkan. Berdasarkan penelitian di Amerika disimpulkan bahwa "*Entrepreneurship are made not born*". Artinya kewirausahaan bukanlah dibawa dari lahir akan dapat dipelajari, dan yang menjadi wirausaha dapat berasal dari semua golongan. Mereka yang dapat menjadi wirausahawan adalah orang-orang yang mengenal potensi dirinya dan maubelajar mengembangkan potensi tersebut untuk menangkap peluang dan mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya.

Dengan demikian kewirauasahan harus diajarkan bukan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari menjalankan suatu usaha, tetapi lebih diajarkan sebagai proses dalam menciptakan usaha baru dan meningkatkan kinerja secara terus menerus berdasarkan prinsip, kreatif dan inovatif. Di sisi lain proses kewirausahaan di pengaruhi oleh berbagai foktor.

Faktor tersebut antara lain: pribadi, sosiologi , organisasi, kebudayaan dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut yang menentukan terjadinya internal locus of control, creativitas dan inovasi sebagai pemicu pertumbuhan.

Di sisi lain perguruan tinggi mempunyai peranan yang besar dalam memberikan ilmu kewirausahaan karena didukung oleh fasilitas yang dimiliki (sarana, prasarana dan staf pengajar). Di samping itu, lulusan Perguruan Tinggi sangat potensial untuk menjadi wirausahawan karena telah memiliki sejumlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan kewirausahaan.

D. PENUTUP

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu pengembangan sumberdaya manusia harus sebagai fokus sentral dalam pembangunan suatu negara. Studi yang dilakukan oleh Harbison (1974) memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan pada periode 1956-1973 telah mampu meningkatkan Pendapatan Nasional Amerika Serikat pada periode tersebut sebesar 30%.

Melalui pendidikan manusia akan mampu mentransformasi pekerjaan otot menjadi pekerjaan otak dan melalui pendidikan akan dapat diciptakan

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

379.123
APIA
0(2)

tenaga kerja profesional yang memiliki kinerja tinggi yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan nasional. Dalam teori *Human Capital* dinyatakan bahwa pendididikan bukan merupakan kegiatan konsumtif tetapi merupakan kegiatan produktif dan investasi.

Pendidikan yang baik adalah pendididkan yang mampu mengakomodasikan dinamika kehidupan manusia ke dalam kurikum sekolah. Di sisi lain kemajuan di bidang teknologi dan informasi bukan hanya mempercepat pengusangan barang produk industri saja, tetapi juga berdampak terhadap kurikulum pendidikan. Oleh karena itu perubahan yang terjadi di tengah masyarakat harus cepat di respon oleh kurikulum, jika tidak demikian kurikulum yang dipakai pada suatu lembaga pendidikan tidak akan banyak memberikan kontribusi dalam menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Pendidikan Kewirausahaan merupakan salah satu cara mempersiapkan output pendidikan dengan kebutuhan pasar dan pendidikan kewirausahaan merupakan cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meskipun ada pendapatan yang menyatakan bahwa kewirausahaan tersebut tidak dapat diajarkan. Di sisi lain hasil penelitian di Amerika Serikat menyimpulkan

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

"*Entrepreneurship are made not born*". Artinya kewirausahaan bukan dibawa dari lahir akan tetapi dapat dipelajari. Mereka yang dapat menjadi wirausahawan adalah orang-orang yang mengenal potensi dirinya dan mau belajar mengembangkan potensi tersebut untuk menangkap peluang dan mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya. Di sisi lain proses kewirausahaan di pengaruhui oleh berbagai faktor-faktor. Faktor tersebut antara lain: pribadi, sosiologi , organisasi, kebudayaan dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut akan menentukan terjadinya internal locus of control, kreativitas dan inovasi sebagai pemicu pertumbuhan.

Dengan memperhatikan potensi yang di miliki, perguruan tinggi mempunyai peranan yang besar dalam memberikan ilmu kewirausahaan karena didukung oleh fasilitas yang dimiliki (sarana, prasarana dan staf pengajar). Di samping itu, lulusan Perguruan Tinggi sangat potensial untuk menjadi wirausahawan karena telah memiliki sejumlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan kewirausahaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Anderson, James (1989). **Public Choice and Social Welfare.** New York: McMillian Hill.

Basri, Faisal H (1995). **Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI..** Jakarta: Penerbit Airlangga.

Harbison (1974). **Human Invesment.** New York: McMillian Publishing.

Osborne, David and Ted Gaebler (1992). **Reinventing Government: How the Entrepreneural Spirit the Public Sector.** New York: Penguin Book Ltd.

Vrye, D (1994). **Public Policy Making.** New York: McGraw Hill Book Company.